



SULTAN INGATKAN Jangan Ada Klaster Pariwisata

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pembukaan objek wisata yang saat ini mulai dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di DIY perlu diimbangi dengan penyiapan skenario yang matang. Termasuk kemungkinan munculnya kasus baru dari dibukanya objek wisata, hotel dan restoran tersebut. Karena tidak cukup sekadar berhenti pada level pencegahan. Tapi penerapan protokol kesehatan menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, karena cara itu paling efektif untuk melau-

kukan pencegahan. Gubernur DIY minta agar jangan ada kasus yang berkait dengan pariwisata.

"Saya minta kebijakan pembukaan objek wisata harus melalui pemikiran yang matang. Untuk itu saya minta kepada para bupati dan walikota bisa berpikir jangka panjang. Jadi tidak sekadar pintu masuk dijaga TNI, Polri atau Satpol PP. Misalnya saja wisatawan datang negatif begitu pulang dari tempat wisata tiga hari berikutnya menderita sakit, begitu diperiksa kecenderungan positif. Jadi solusinya dengan menerapkan pen-

dataan wisatawan lewat cara digital," kata Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedhông Pracimosono Kompleks Kepatihan, Senin (6/7).

Menurut Sultan, sejumlah upaya terus dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyebaran Covid-19 termasuk di tempat wisata. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan pendataan digital setiap wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Seluruh data terkumpul dalam bank data yang dimiliki Pemda DIY yang isinya meliputi nomor handphone,

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Jangan

alamat dan nama wisatawan. Aplikasi yang adalah Jogja Pass yang ada di Diskominfo DIY. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan bisa memudahkan pendataan. Karena berfungsi sebagai identitas digital bagi wisatawan maupun warga yang datang ke Yogyakarta. "Kerja sama untuk QR code ini match ke Pemda DIY. Tindakan itu perlu dilakukan karena fungsinya penting untuk tracing. Seharusnya pembukaan objek wisata itu dilakukan secara bertahap jangan langsung semua dibuka. Jangan sampai terjadi Covid kedua kalinya. Saya minta jangan cari gampang dapat tiket, tapi pikir risikonya juga," tegasnya.

Terpisah Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) DIY Korwil Jawa Edwin Ismedi Himna menegaskan melihat kondisi tersebut, pelaku industri pariwisata meminta Pemda turun tangan dengan membuat aturan berikut dengan

sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Sebab sangat disadari masyarakat sudah butuh hiburan dan berlibur, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan mengingat masih masa pandemi Covid-19.

"Kami butuh bantuan dari Pemerintah guna menertibkannya dan jangan sampai berlarut-larut sehingga akan menjadi pemicu klaster baru atau gelombang kedua pandemi Covid-19 di DIY. Masyarakat sendiri sebenarnya harus mempunyai kesadaran diri untuk disiplin dan tertib mematuhi protokol yang telah ditetapkan Pemerintah selama masa pandemi Covid-19 yang utamanya harus menghindari kerumunan alias physical distancing," terangnya.

Edwin mengatakan destinasi wisata pun harus benar-benar bisa memenuhi syarat sesuai SOP protokol kesehatan yang telah ditetapkan, semisal pembatasan jumlah wisatawan yang

Sambungan hal 1

masuk ke sebuah destinasi wisata. Destinasi wisata harus benar-benar siap dan memenuhi syarat baru bisa buka agar tidak menimbulkan klaster baru kasus virus Korona di DIY.

"Baik pengelola destinasi wisatawan maupun wisatawan sendiri keduanya harus mematuhi peraturan dan berhati-hati agar mata rantai penularan Covid-19 bisa benar-benar diputus. Pemerintah sendiri harus bisa memberikan sanksi yang tegas semisal berupa denda agar memberikan efek jera bagi yang melanggar, termasuk bagi pengunjung atau wisatawan," imbuh Pemilik Trend Tour Travel ini.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asita DIY Udhil Sudiyanto mengatakan dirinya sangat menyayangkan jika ada wisatawan tidak mematuhi protokol kesehatan karena akan menambah panjang pandemi ini.

(Ria/Ira)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 08 Agustus 2020
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005